

**ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN ISU PERCEPATAN REFORMASI
KEPOLISIAN PADA MEDIA ONLINE KOMPAS.COM:
KAJIAN TEUN A. VAN DIJK**

Indanian Nainggolan¹, Hendra Kurnia Pulungan², Ita Khairani³

^{1,2,3} Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan

[¹indaniann@gmail.com](mailto:indaniann@gmail.com), [²hendrakurnia@unimed.ac.id](mailto:hendrakurnia@unimed.ac.id), [³itakhairani342@gmail.com](mailto:itakhairani342@gmail.com)

ABSTRACT

Online media not only conveys information, but also actively frames reality according to certain ideological interests, including in reporting the issue of accelerating police reform which has recently become a public spotlight. This study aims to analyze the discourse construction of the issue of accelerating police reform in Kompas.com news through text structure (macrostructure, superstructure, microstructure) and the social context behind it, using Teun A. Van Dijk's Critical Discourse Analysis model. This study uses a descriptive qualitative approach with data in the form of ten Kompas.com news texts published from November 7, 2025 to February 25, 2026, analyzed through the interactive model of Miles and Huberman. The results show that Kompas.com constructs police reform as a top-down institutional program through a layered legitimacy pattern: the macrostructure emphasizes formal-procedural legitimacy while eliminating the voices of victims, the superstructure places criticism at the end of the text as a de-escalation strategy, and the microstructure utilizes administrative euphemisms and elite-based authorization. From a social context perspective, a pattern of event substitution was found that dissolves concrete issues into abstract discourse, weakening the accountability pathway and revealing a gap between the media's image of reform and the reality of recurring police issues.

Keywords: *critical discourse analysis, police reform, Kompas.com, Teun A. Van Dijk*

ABSTRAK

Media online tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga aktif membingkai realitas sesuai kepentingan ideologis tertentu, termasuk dalam pemberitaan isu percepatan reformasi kepolisian yang belakangan menjadi sorotan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi wacana isu percepatan reformasi Polri dalam pemberitaan Kompas.com melalui struktur teks (makrostruktur, superstruktur, mikrostruktur) serta konteks sosial yang melatarbelakanginya, menggunakan model Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data berupa sepuluh teks berita Kompas.com yang dipublikasikan pada 7 November 2025 hingga 25 Februari 2026, dianalisis melalui model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com mengonstruksi reformasi Polri sebagai program institusional *top-down* melalui pola legitimasi berlapis: makrostruktur menonjolkan legitimasi formal-prosedural sembari melesapkan suara korban, superstruktur menempatkan kritik pada bagian akhir teks sebagai strategi de-eskalasi, dan

mikrostruktur memanfaatkan eufemisme administratif serta otorisasi berbasis figur elite. Dari sisi konteks sosial, ditemukan pola pergantian rujukan peristiwa (*event substitution*) yang melarutkan persoalan konkret menjadi wacana abstrak, sehingga jejak akuntabilitas melemah dan tampak kesenjangan antara citra reformasi yang dibangun media dan realitas persoalan kepolisian yang masih berulang.

Kata Kunci: analisis wacana kritis, reformasi kepolisian, Kompas.com, Teun A. Van Dijk

A. Pendahuluan

Media massa memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap realitas sosial, politik, dan hukum. Perkembangan media dianggap sebagai penanda kemajuan masyarakat menuju masyarakat modern (Pulungan, 2016), sekaligus menjadi ruang pertarungan ideologi antarkelompok dalam masyarakat, karena media pada dasarnya adalah agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai kepentingannya (Hamdani dkk., 2022). Meski kerap dipandang sebagai saluran informasi yang netral (Eriyanto, 2011), netralitas tersebut sulit dicapai secara mutlak sebab setiap produksi berita melibatkan seleksi fakta, sudut pandang, dan pilihan bahasa tertentu. Media, dengan demikian, bukan sekadar penyampai fakta, melainkan ruang tempat kelompok dominan menyebarkan pengaruh dan

meminggirkan kelompok lain (Eriyanto, 2011).

Pergeseran ke media online memperkuat kecenderungan tersebut. Media online tidak hanya menyebarkan informasi secara masif, tetapi juga aktif membingkai isu sesuai sudut pandang dan kepentingan ideologis yang melatarbelakanginya (Eriyanto, 2011), sekaligus berperan aktif menyeleksi dan menafsirkan peristiwa melalui Bahasa, memilih kata, menyusun struktur teks, menonjolkan aktor tertentu, sekaligus menghilangkan aspek lain dari realitas. Dalam kerangka linguistik, praktik ini berkaitan erat dengan wacana, yaitu satuan bahasa lisan maupun tulis yang memiliki kesinambungan dan kepaduan makna dalam komunikasi sosial (Setiawati & Rusnawati dalam Fitriani & Maikalsum, 2024). Bahasa dalam wacana media bukan sekadar alat komunikasi, melainkan praktik sosial yang merefleksikan nilai, ideologi, dan realitas tertentu (Khairani & Sinaga,

2020), sehingga wacana tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya.

Salah satu isu nasional yang secara intens diberitakan media online dalam beberapa tahun terakhir adalah percepatan reformasi kepolisian. Isu ini muncul sebagai respons atas meningkatnya sorotan publik terhadap kinerja dan integritas Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama setelah mencuatnya sejumlah kasus yang memicu krisis kepercayaan publik dan melahirkan gerakan sosial seperti "*No Viral, No Justice*" (Firmansyah, 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi ideal kepolisian sebagai penegak hukum dan realitas pelayanan hukum yang dirasakan masyarakat, sehingga reformasi kepolisian bergeser dari sekadar agenda internal institusi menjadi wacana publik yang diperdebatkan secara luas di ruang media. Urgensi isu ini tidak hanya terletak pada substansi kebijakan, tetapi juga pada bagaimana isu tersebut direpresentasikan melalui bahasa media, melalui judul, susunan informasi, pemilihan narasumber, dan diksi yang pada akhirnya mengarahkan cara publik memahami

posisi Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam agenda reformasi tersebut.

Penelitian ini menjadikan Kompas.com sebagai objek kajian karena posisinya sebagai salah satu portal berita nasional dengan kredibilitas dan jangkauan pembaca yang tinggi (Pangestu & Putri, 2022), serta konsistensinya dalam meliput isu kebijakan publik dan institusi negara, yang menempatkannya pada posisi strategis dalam membentuk wacana dominan di masyarakat. Untuk mengkaji bagaimana Kompas.com mengonstruksi wacana tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK), yang memandang bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan kekuasaan, ideologi, dan kepentingan tertentu (Luma & Sulistyawati dalam Karmizi & Gustia, 2025). Di antara berbagai model AWK, model Teun A. Van Dijk banyak digunakan dalam penelitian media karena menekankan analisis pada tiga dimensi wacana, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial (Safitri dkk., 2024), dengan dimensi teks mencakup makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur.

Model ini dipilih karena tidak hanya memberikan kerangka untuk menganalisis organisasi teks berita, tetapi juga memungkinkan peneliti memahami keterkaitan antara teks dan kondisi sosial yang melatarbelakanginya.

Penelusuran terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian AWK model Van Dijk umumnya berfokus pada isu politik elektoral, kriminalitas, atau tokoh publik, sementara penelitian yang secara khusus mengkaji pemberitaan percepatan reformasi kepolisian terutama yang menitikberatkan pada struktur teks dan keterkaitannya dengan konteks sosial dalam media online arus utama masih tergolong terbatas. Kesenjangan penelitian (research gap) inilah yang menjadi dasar kebaruan (novelty) penelitian ini. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan (1) menganalisis konstruksi wacana isu percepatan reformasi kepolisian dalam pemberitaan Kompas.com ditinjau dari struktur teks yang meliputi makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur berdasarkan model Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk, dan (2) menganalisis konteks sosial yang memengaruhi konstruksi

wacana tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian linguistik kritis media, sekaligus memperkaya pemahaman mengenai peran media massa dalam membentuk wacana reformasi institusi negara. Bagian-bagian yang dimaksud di atas tidak harus diuraikan dalam bentuk poin-poin terpisah. Ketajaman bagian ini merupakan pondasi bagi reviewer untuk menilai naskah yang ada.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan mendeskripsikan konstruksi wacana isu percepatan reformasi kepolisian dalam pemberitaan media daring secara mendalam melalui interpretasi teks berita, bukan pengukuran statistik. Analisis dilakukan menggunakan model Analisis Wacana Kritis (AWK) Teun A. Van Dijk, yang memandang wacana sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan ideologi, kekuasaan, dan konstruksi realitas sosial (Eriyanto, 2011).

Data penelitian berupa satuan kebahasaan kata, frasa, kalimat, paragraf, judul, dan lead yang

terdapat dalam sepuluh teks berita Kompas.com mengenai isu percepatan reformasi Polri yang dipublikasikan pada periode 7 November 2025 hingga 25 Februari 2026.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi, peneliti memilah bagian teks yang relevan dengan struktur wacana (makrostruktur/tema, superstruktur, skema, dan mikrostruktur, aspek kebahasaan berupa semantik, sintaksis, stilistika, dan retorik) serta data terkait konteks sosial berupa peristiwa dan wacana publik yang melatarbelakangi pemberitaan. Data yang telah direduksi disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel coding per artikel dan sintesis tematik lintas artikel, untuk selanjutnya diinterpretasikan guna mengungkap pola legitimasi dan ideologi yang dibangun media dalam mewacanakan reformasi kepolisian. Verifikasi dilakukan secara berulang untuk menjaga konsistensi dan keabsahan temuan terhadap rumusan masalah penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data penelitian berupa sepuluh teks berita Kompas.com mengenai isu percepatan reformasi kepolisian yang dipublikasikan pada 7 November 2025 hingga 25 Februari 2026 (Tabel 1). Kesepuluh teks tidak berdiri sebagai peristiwa terpisah, melainkan membentuk rangkaian wacana yang berkembang seiring waktu, mulai dari pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri, dinamika kerja dan konflik kewenangan di dalamnya, proses formalisasi legislatif, hingga pengakuan atas krisis kultural yang belum terselesaikan.

Tabel 1 Data Berita yang Dianalisis

Kode	Judul Berita	Tanggal Berita
B1	Daftar Nama 10 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang Resmi Dilantik Presiden Prabowo	7 Nov 2025
B2	Komisi Reformasi Polri Siap Bekerja, Besok Gelar Rapat Perdana	9 Nov 2025
B3	3 Bulan Kerja Komisi Reformasi Polri: Audiensi, Evaluasi, dan Revisi	25 Nov 2025
B4	Jimly Sebut Komisi Reformasi Polri Kaget, Tidak Tahu Ada Perpol 10/2025	18 Des 2025
B5	Jimly: Bukan Hanya Polisi, Semua Aparat Penegak	21 Des 2025

	Hukum Evaluasi	Perlu	
B6	DPR Setujui 8 Poin Percepatan Reformasi Polri, Tegaskan Kedudukan Tetap di Bawah Presiden		27 Jan 2026
B7	DPR Mentahkan Wacana Polri di Bawah Kementerian		28 Jan 2026
B8	Mahfud MD: Komisi Reformasi Polri Bukan Bertugas Menyelesaikan Kasus		18 Feb 2026
B9	Persoalan kultur jadi masalah serius internal Polri		23 Feb 2026
B10	Rentetan kasus polisi, alarm reformasi menyeluruh		25 Feb 2026

Struktur Teks Wacana

a. Struktur Makro (Tematik)

Analisis makrostruktur terhadap tema global dan subtema kesepuluh berita menunjukkan empat kategori tematik yang berulang: legitimasi kelembagaan dan prosedural negara (B1, B2, B3, B6, B7); disharmoni dan pembatasan kewenangan internal (B4, B8); perluasan wacana yang dibatasi cakupan tindakannya (B5, B7); serta pengakuan krisis yang direduksi dan ditunda (B3, B9, B10). Pada Berita 1, misalnya, tema “pelantikan Komisi Percepatan Reformasi Polri” tidak dapat dipahami sekadar sebagai laporan peristiwa seremonial: kaidah deletion

menunjukkan bahwa redaksi melesapkan suara riil korban maupun aktivis yang justru menjadi pemicu pembentukan komisi tersebut, sehingga fokus pembaca dikunci semata pada legitimasi tindakan Presiden sebagai aktor tunggal yang merespons persoalan.

b. Superstruktur (Skematik)

Analisis superstruktur menunjukkan bahwa kesepuluh berita secara konsisten menggunakan skema piramida terbalik, menempatkan informasi administratif dan seremonial pada judul dan lead. Temuan paling signifikan terlihat pada Berita 3: data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengenai 95 kasus kriminalisasi oleh anggota kepolisian sepanjang 2019–2024 justru diletakkan pada bagian paling akhir teks (coda), setelah linimasa kerja komisi yang optimistis dipaparkan secara rinci di bagian awal. Penataan hierarki ini dapat dibaca sebagai strategi de-eskalasi isu, karena posisi akhir teks secara psikologis memiliki daya ingat paling rendah bagi pembaca.

c. Struktur Mikro

Pada tataran mikrostruktur, ditemukan dominasi eufemisme administratif, seperti frasa “berbagai

aspirasi publik” dan “menyerap aspirasi” untuk memperhalus tuntutan masyarakat, serta leksikon “percepatan” yang mengonstruksi persoalan bukan sebagai krisis yang harus dipulihkan, melainkan proses yang tinggal dipercepat. Subjek gramatikal aktif (Presiden, Ketua Komisi, DPR, Kapolri) konsisten ditempatkan sebagai agen yang bertindak, sementara kalimat pasif digunakan terbatas pada latar belakang reformasi untuk menghilangkan pelaku tindakan. Strategi retorik *argumentum ad verecundiam*, yaitu legitimasi melalui penyebutan nama dan jabatan pejabat, ditemukan pada B1, B2, dan B7, berdampingan dengan retorika angka pada B3, B5, dan B7.

Tabel 2 Ringkasan Temuan Struktur Teks

Struktur	Temuan Utama
Makrostruktur	Reformasi Polri diposisikan sebagai program institusional top-down berlandaskan legitimasi formal-prosedural (Keppres, Perpol, UU); suara korban/masyarakat sipil dilesapkan (deletion).
Superstruktur	Skema piramida terbalik; informasi seremonial pada judul/lead; kritik dan data kritis (mis. data YLBHI pada B3)

	ditempatkan pada coda sebagai strategi de-eskalasi.
Mikrostruktur	Eufemisme administratif (“menyerap aspirasi”, “percepatan”); subjek gramatikal aktif menonjolkan negara; legitimasi berbasis figur otoritas (<i>argumentum ad verecundiam</i>) dan retorika angka.

Ketiga tingkatan struktur tersebut saling berkaitan makrostruktur menentukan tema utama, superstruktur menyusun informasi agar mendukung tema tersebut, dan mikrostruktur memperkuatnya melalui pilihan kata, kalimat, dan unsur retorik, sehingga membentuk pola legitimasi berlapis (*layered legitimation*) yang konsisten pada seluruh berita yang dianalisis, sejalan dengan konsep legitimasi dalam wacana media (Van Leeuwen, 2007).

Hasil analisis konteks sosial menunjukkan dua kategori yang saling memengaruhi: peristiwa sosial dan wacana publik (Tabel 3). Tiga peristiwa sosial utama melatarbelakangi pemberitaan, yaitu gelombang kritik dan kemarahan publik terhadap Polri pada Agustus 2025 yang menjadi latar pembentukan komisi, penerbitan Peraturan

Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 yang memicu ketegangan kewenangan antarlembaga, serta rentetan kasus kekerasan dan penyalahgunaan wewenang aparat pada awal 2026. Fokus pemberitaan berubah seiring waktu: B1–B3 membahas pembentukan komisi sebagai respons kritik publik, B4–B8 berfokus pada kebijakan dan pelaksanaan reformasi, sedangkan B9–B10 menyoroti kasus-kasus konkret sebagai latar pembahasan reformasi.

Tabel 3 Ringkasan Konteks Sosial

Aspek	Temuan
Peristiwa Sosial	Gelombang kritik publik Agustus 2025; terbitnya Perpol No. 10/2025; rentetan kasus kekerasan/penyalahgunaan wewenang aparat awal 2026 (B1–B3, B4 & B7, B9–B10).
Wacana Publik	Relasi sipil-Polri pascareformasi (B4, B6, B7) dan akuntabilitas lembaga penegak hukum secara lebih luas, mencakup kejaksaan dan peradilan (B5, B8).

Wacana publik yang tercermin dalam pemberitaan mencakup relasi sipil dan kepolisian pascareformasi (B4, B6, B7) serta akuntabilitas lembaga penegak hukum yang diperluas hingga kejaksaan dan peradilan, sebagaimana disampaikan

Jimly Asshiddiqie pada B5 dan Mahfud MD pada B8. Secara keseluruhan, konstruksi wacana dalam pemberitaan Kompas.com tidak berlangsung linear, melainkan diwarnai pola pergantian rujukan peristiwa (event substitution): peristiwa konkret seperti gelombang kemarahan publik Agustus 2025 maupun rentetan kekerasan aparat awal 2026 secara bertahap dilarutkan menjadi wacana abstrak “persoalan kultural jangka panjang”, sehingga jejak akuntabilitas atas persoalan konkret yang melatarbelakangi tuntutan reformasi semakin berkurang di sepanjang rangkaian pemberitaan.

Pola pelemahan ini turut membentuk institutional alignment yang bersifat struktural dan situasional: pemberitaan cenderung mengikuti rentang perdebatan di kalangan elite dan pejabat resmi, sehingga ruang kritik eksternal, seperti suara Indonesia Police Watch (IPW) pada B10, hanya dibuka sejauh persoalan telah diakui secara resmi oleh elite pengambil kebijakan, bukan atas inisiatif independen media itu sendiri. Temuan ini memperkuat argumen bahwa Kompas.com, sebagai media arus utama, berisiko terjebak dalam logika produksi berita

yang lebih banyak mengikuti dinamika negosiasi wacana di antara pihak berkuasa, ketimbang secara aktif menghadirkan representasi kritis dari luar lingkaran tersebut, sehingga tampak kesenjangan antara citra reformasi yang dibangun media dan realitas persoalan kepolisian yang masih berulang hingga akhir periode data

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal yang menjawab rumusan masalah penelitian ini. Pertama, ditinjau dari struktur teks, Kompas.com secara konsisten mengonstruksi wacana percepatan reformasi Polri sebagai proses institusional yang dikelola secara top-down melalui pola legitimasi berlapis (layered legitimation). Makrostruktur diposisikan sebagai program institusional yang dikelola dari pusat melalui legitimasi formal-prosedural sembari melepaskan suara korban dan kelompok masyarakat sipil noninstitusional. Superstruktur disusun dengan skema piramida terbalik yang menempatkan informasi seremonial pada judul dan lead, sementara kritik ditempatkan pada

bagian akhir teks (coda) sebagai strategi de-eskalasi kognitif. Mikrostruktur memanfaatkan eufemisme administratif, kalimat aktif yang menonjolkan peran negara, kalimat pasif yang mengaburkan pihak bertanggung jawab, serta otorisasi berbasis figur elite dan leksikon legalistik sebagai penguat legitimasi. Ketiga tingkat struktur tersebut bekerja secara terpadu dan konsisten ditemukan pada kesepuluh berita dengan konteks serta waktu penerbitan yang berbeda-beda.

Kedua, ditinjau dari konteks sosial, konstruksi wacana tidak berlangsung linear, melainkan diwarnai pola pelemahan dan pergantian rujukan peristiwa (event substitution). Peristiwa konkret seperti gelombang kemarahan publik Agustus 2025 dan rentetan kekerasan aparat awal 2026 secara bertahap dilarutkan menjadi wacana abstrak “persoalan kultural jangka panjang”, sehingga jejak akuntabilitas atas persoalan konkret semakin berkurang. Pola ini turut membentuk institutional alignment yang bersifat struktural dan situasional, yaitu kecenderungan media mengikuti rentang perdebatan kalangan elite, sehingga ruang kritik eksternal hanya terbuka sejauh telah

diakui secara resmi oleh elite pengambil kebijakan. Akibatnya, terdapat kesenjangan nyata antara citra reformasi yang dibangun melalui pemberitaan dan realitas persoalan kepolisian yang masih berulang hingga akhir periode data penelitian.

Berdasarkan temuan tersebut, redaksi media disarankan mengintegrasikan substansi kritik publik dan data masyarakat sipil secara lebih proporsional sejak paragraf awal berita, bukan semata pada bagian penutup; pembaca disarankan membiasakan diri membaca berita hingga tuntas dan mengenali strategi eufemisme serta otorisasi berbasis figur elite; sementara penelitian lanjutan disarankan menjangkau dimensi kognisi sosial wartawan serta membandingkan pola serupa pada media dengan latar kepemilikan atau ideologi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Firmansyah, D. (2023). Fenomena No Viral No Justice perspektif teori penegakan hukum. *Ranah Research Journal*, 5(4), 112–125.
- Fitriani, N., & Maikalsum, A. (2024). Analisis Wacana Kritis Model Teun Van Dijk Pada Berita Online Fakta Terbaru Kasus Agus Buntung, Jumlah Terus Bertambah Hingga Jadi Sorotan DPR RI. Ekasakti *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 5(1), 126–132.
- Hamdani, A., & Vionita, N. (2022). Struktur teks dan ideologi pada wacana berita daring bertema pemilihan Gubernur DKI. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 22(4), 65–76.
- Karmizi, Y., & Gustia, M. (2025). Analisis wacana kritis model Van Dijk pada pemberitaan ijazah palsu Jokowi di media online. *Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra*, 12(2), 167–175.
- Khairani, I., & Sinaga, A. N. (2020). Nilai-nilai pendidikan dalam teks Kaba Minangkabau “Anggun Nan Tongga Si Magek Jabang”. *Jurnal Lakhomi: Jurnal Ilmiah Kebudayaan*, 1(1), 15–22.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Pangestu, A., & Putri, S. A. R. (2022). Pola pemberitaan media online Kompas.com dalam pelaporan serangan terorisme di Indonesia 2016–2020. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 5(2), 193–208.
- Pulungan, H. K. (2016). Pluralisme dan media. *Jurnal Bahas Unimed*, 27(1), 78353.
- Safitri, I., Wulandari, D., Santika, M. F., & Pulungan, H. K. (2024). Makna keluarga dalam iklan IM3 “Dekatkan Jarak, Nyatakan Silaturahmi”: Perspektif teori Van Dijk. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2427–2431.
- Van Leeuwen, T. (2007). Legitimation in discourse and communication. *Discourse & Communication*, 1(1), 91–112.